

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN

SURVEI PERSEPSI KORUPSI

PADA

PENGADILAN NEGERI

PEKANBARU KELAS IA



FEBRUARI

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan pelaksanaan	7
BAB III	9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil responden	9
3.2. Indeks persepsi korupsi perindikator	14
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	24
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	26
BAB IV	27
PENUTUP	27
4.1. Kesimpulan	27
4.2. Rekomendasi	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2016 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survey persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah

disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan focus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disitapa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggungjawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

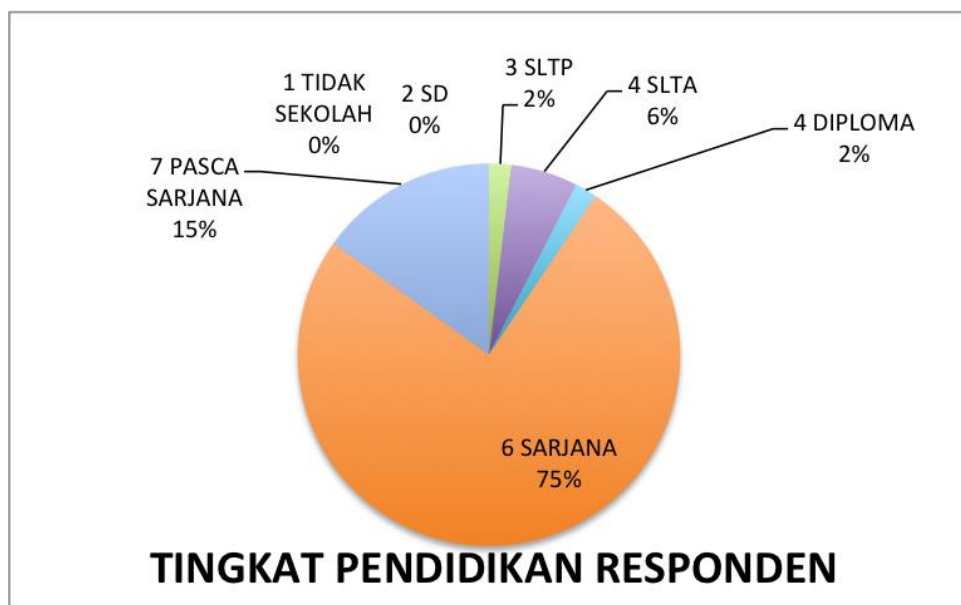
3.1. Profilresponden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Sarjana.

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1	TIDAK SEKOLAH	0	0,0%
1	SD	0	0,0%
2	SLTP	1	2%
3	SLTA	3	6%
4	DIPLOMA	1	2%
5	SARJANA	40	75%
6	PASCA SARJANA	8	15%

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

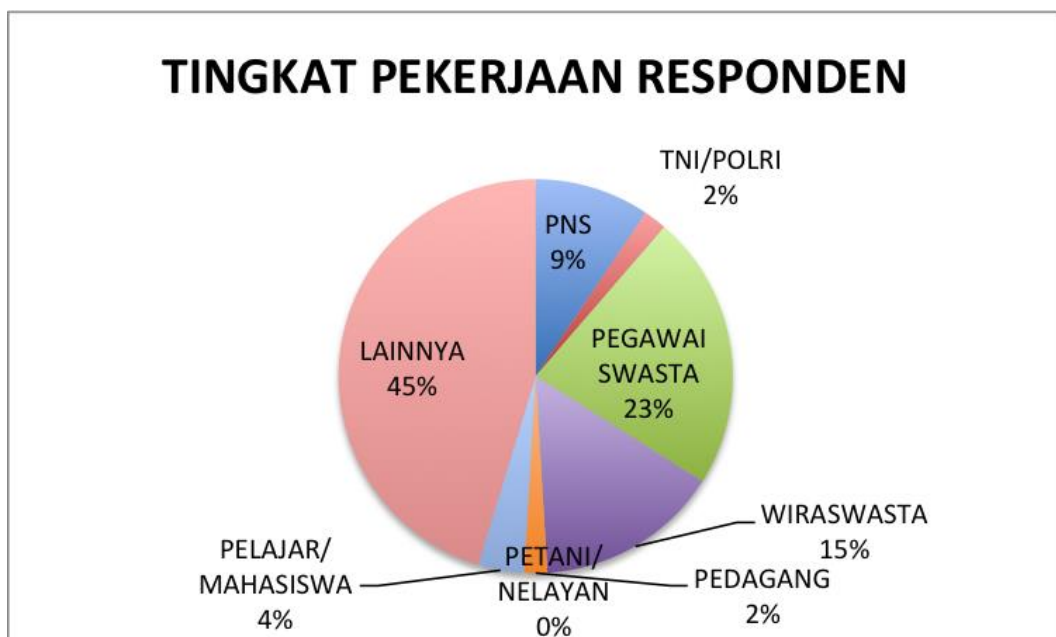


3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 45,29% (dua puluh empat persen)) responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai Lainnya.

NO	PEKERJAAN UTAMA	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1	PNS	5	9%
2	TNI/POLRI	1	2%
3	PEGAWAI SWASTA	12	23%
4	WIRASWASTA	8	15%
5	PETANI/NELAYAN	0	0,0%
6	PEDAGANG	1	2%
7	PELAJAR/MAHASISWA	2	4%
8	LAINNYA	24	45%

Tabel 5.
Jenis Pekerjaan Responden



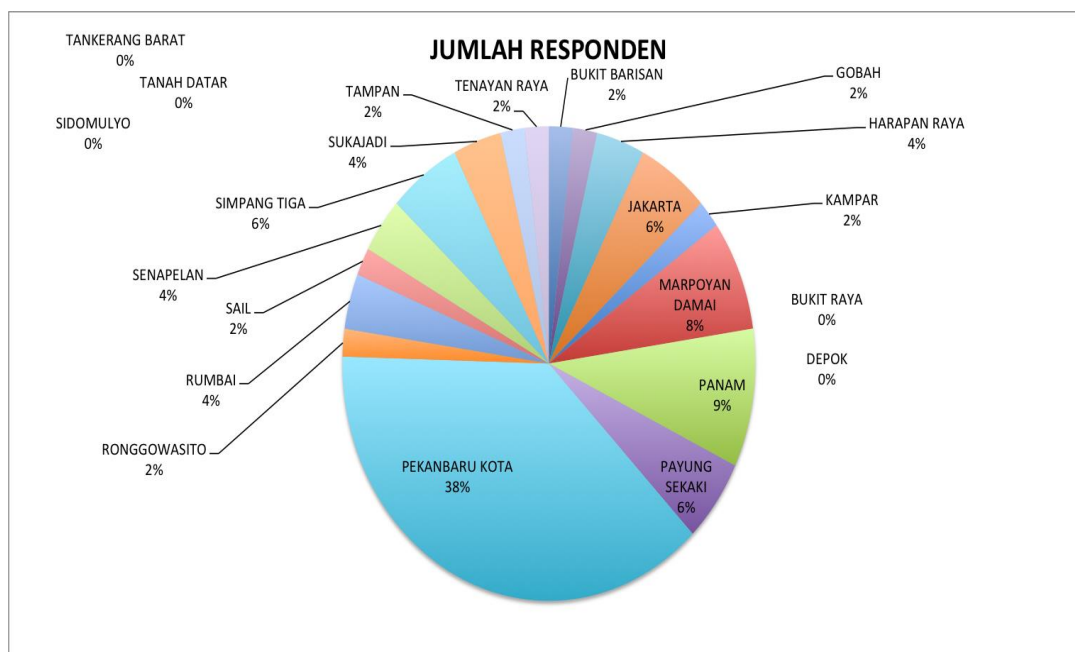
3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasarkan domisili, responden paling banyak berasal dari Kota Pekanbaru dengan 37,74% (dua puluh dua persen).

NO	DOMISILI	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASI
1	BUKIT BARISAN	1	2%
2	BUKIT RAYA	0	0,0%
3	DEPOK	0	0,0%
4	GOBAH	1	2%
5	HARAPAN RAYA	2	4%
6	JAKARTA	3	6%
7	KAMPAR	1	2%
8	MARPOYAN DAMAI	4	8%
9	PANAM	5	9%
10	PAYUNG SEKAKI	3	6%
11	PEKANBARU KOTA	20	38%
12	RONGGOWASITO	1	2%
13	RUMBAI	2	4%
14	SAIL	1	2%
15	SENAPELAN	2	4%
16	SIDOMULYO	0	0,0%
17	SIMPANG TIGA	3	6%
18	SUKAJADI	2	4%
19	TAMPAN	1	2%
20	TANAH DATAR	0	0,0%
21	TANKERANG BARAT	0	0,0%

22	TENAYAN RAYA	1	2%
----	--------------	---	----

Tabel 6
Domisili Responden



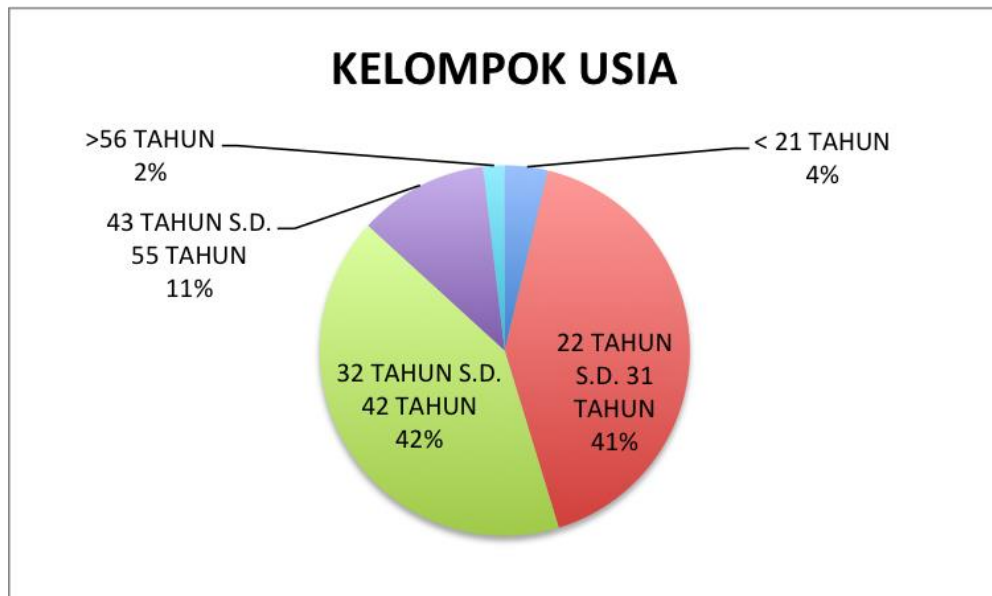
3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 22 tahun s/d 55 tahun. Bagi kelompok usia di atas 56 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 21 tahun.

NO	USIA	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1	< 21 TAHUN	2	4%
2	22 TAHUN S.D. 31 TAHUN	22	41%

3	32 TAHUN S.D. 42 TAHUN	22	42%
4	43 TAHUN S.D. 55 TAHUN	6	11%
5	>56 TAHUN	1	2%

Tabel 7.
Usia responden



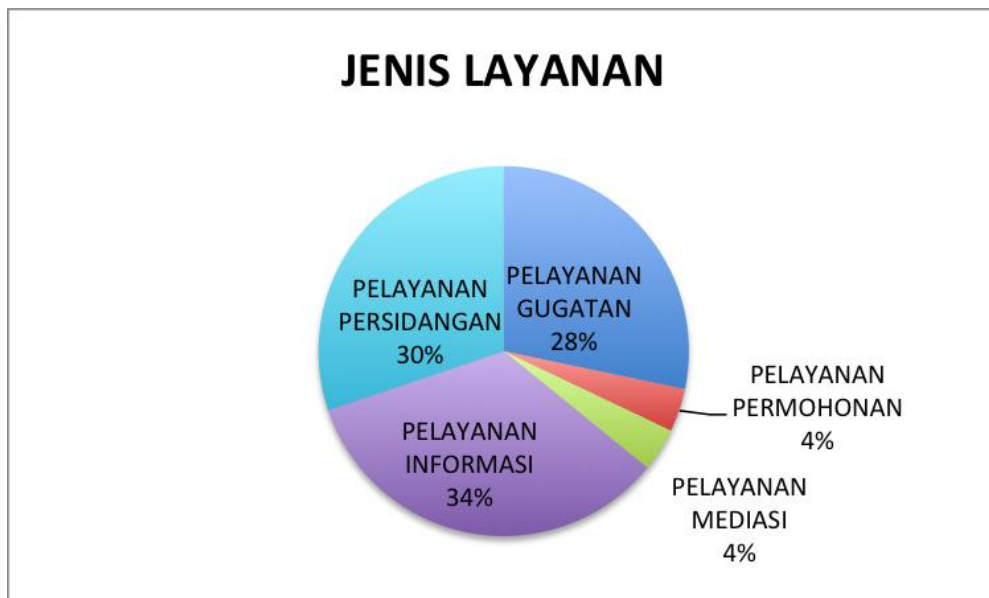
3.1.5. Layanan yang digunakan

Layanan Informasi menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu pelayanan informasi sebesar 33,96% (empat puluh delapan persen).

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASI
1	PELAYANAN GUGATAN	15	28%
2	PELAYANAN PERMOHONAN	2	4%
3	PELAYANAN MEDIASI	2	4%
4	PELAYANAN INFORMASI	18	34%

5	PELAYANAN PERSIDANGAN	16	30%
---	-----------------------	----	-----

Tabel 8.
Jenis layanan yang dipergunakan responden



3.2. Indeks persepsi korupsi perindikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

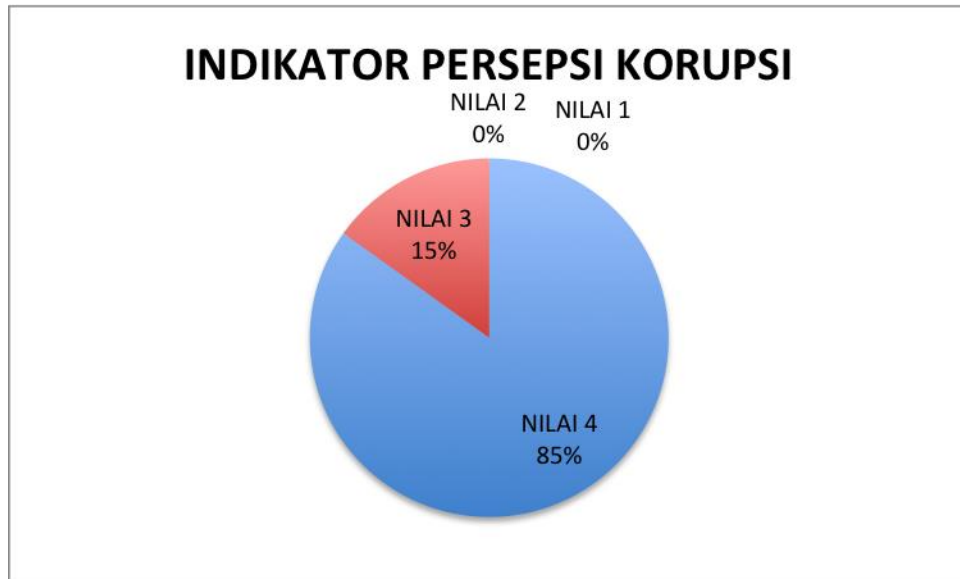
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3.85 (tiga koma delapan puluh lima).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Korupsi.

NO	NILAI	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1	NILAI 4	45	85%
2	NILAI 3	8	15%

3	NILAI 2	0	0,00%
4	NILAI 1	0	0,00%

Tabel 9
Indeks pada indikator manipulasi peraturan



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

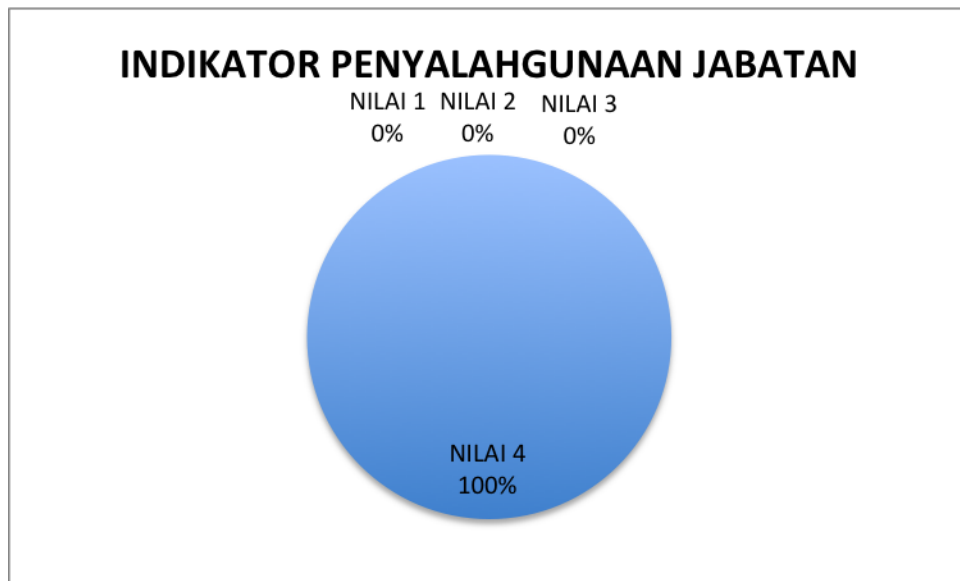
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4 (empat).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Korupsi

NO	NILAI	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1	NILAI 4	53	100%
2	NILAI 3	0	0,00%

3	NILAI 2	0	0,00%
4	NILAI 1	0	0,00%

Tabel 10.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3.81 (tiga koma delapan puluh satu).

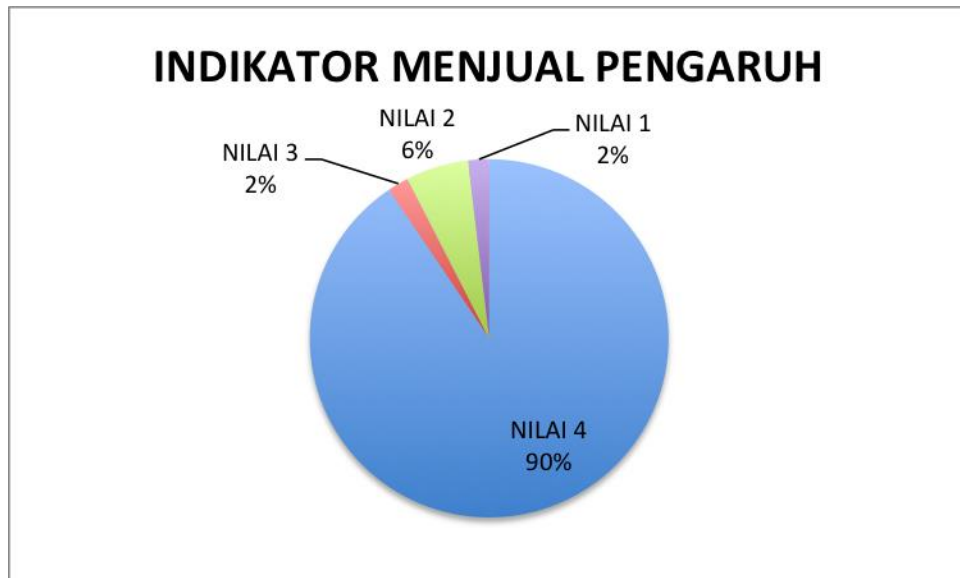
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Korupsi.

NO	NILAI	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1	NILAI 4	48	90%
2	NILAI 3	1	2%

3	NILAI 2	3	6%
4	NILAI 1	1	2%

Tabel 11.

Indeks pada indikator menjual pengaruh



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3.83 (tiga koma delapan tiga)

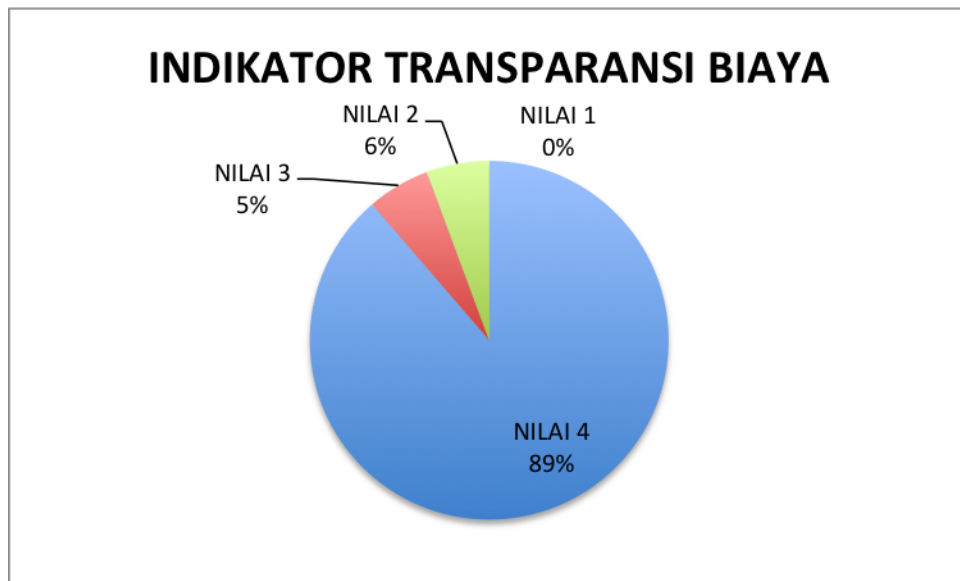
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Korupsi.

NO	NILAI	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1	NILAI 4	47	89%
2	NILAI 3	3	6%

3	NILAI 2	3	5%
4	NILAI 1	0	0,00%

Tabel 12

Indeks pada indikator transparansi biaya



3.2.5. Indikator TransaksiRahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3.83 (tiga koma delapan puluh tiga).

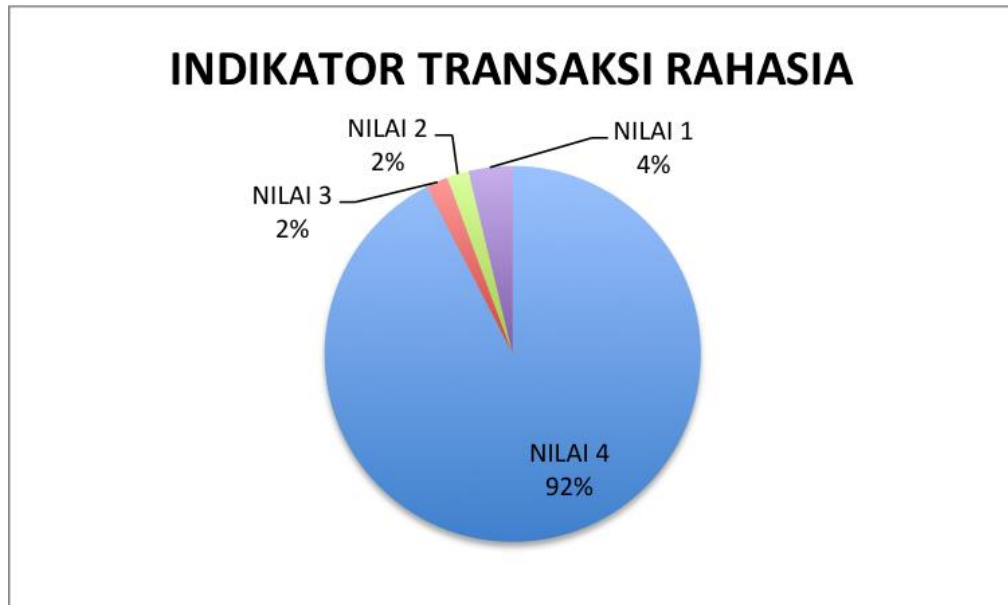
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Korupsi.

NO	NILAI	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1	NILAI 4	49	92%
2	NILAI 3	1	2%

3	NILAI 2	1	2%
4	NILAI 1	2	4%

Tabel 13.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia



3.2.6. Indikator Biaya Tambahan

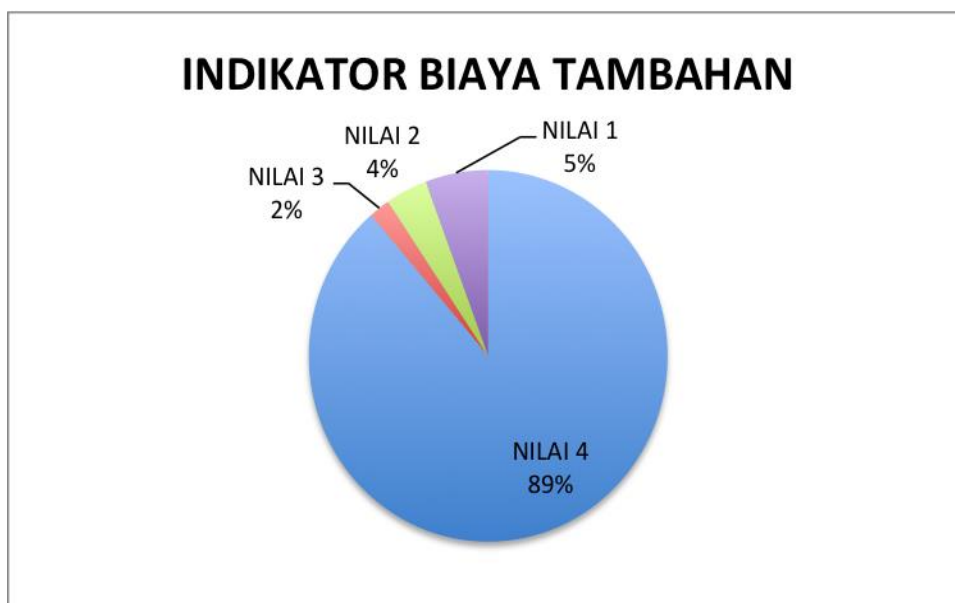
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3.73 (tiga koma tujuh puluh tiga).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Korupsi.

NO	NILAI	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1	NILAI 4	47	89%
2	NILAI 3	1	2%
3	NILAI 2	2	4%

4	NILAI 1	3	5%
---	---------	---	----

Tabel 14.
Indeks pada indikator tambahan biaya



3.2.7. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3.81 (tiga koma delapan puluh satu).

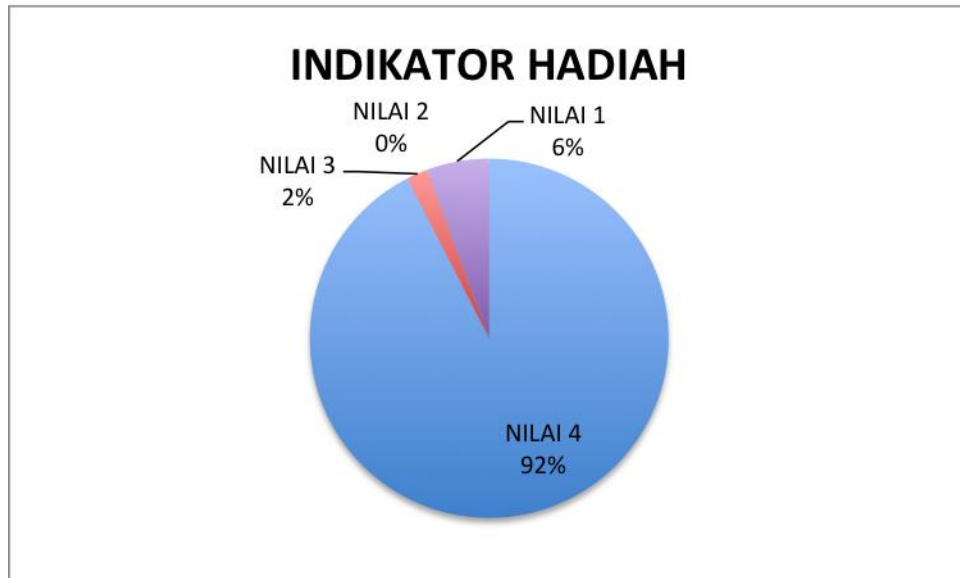
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Korupsi.

NO	NILAI	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1	NILAI 4	49	92%
2	NILAI 3	1	2%
3	NILAI 2	0	0,00%

4	NILAI 1	3	6%
---	---------	---	----

Tabel 15.

Indeks pada indikator hadiah



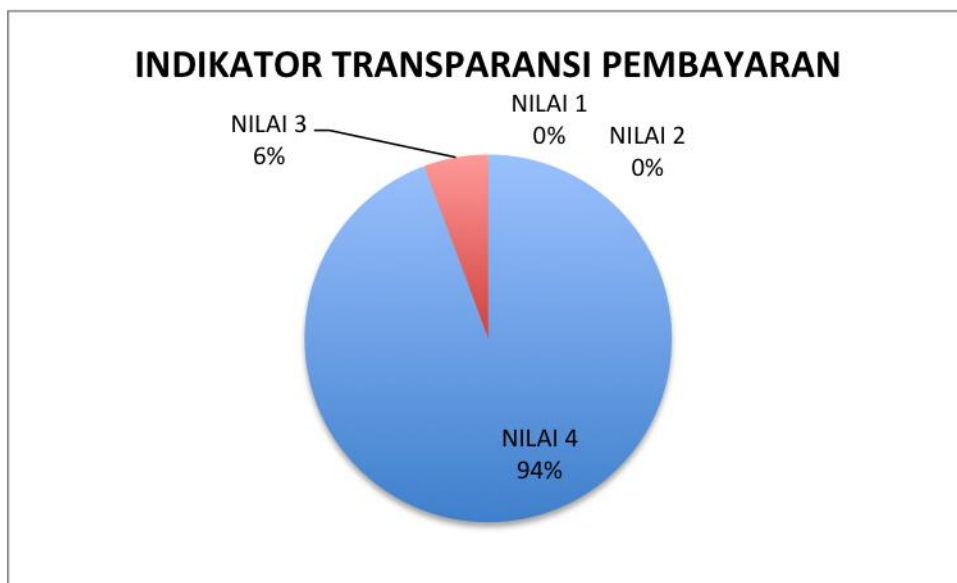
3.2.8. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3.94 (tiga koma Sembilan puluh empat).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Korupsi.

NO	NILAI	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1	NILAI 4	50	94%
2	NILAI 3	3	6%
3	NILAI 2	0	0,00%
4	NILAI 1	0	0,00%

Tabel 16.
Indeks pada indikator transparansi pembayaran



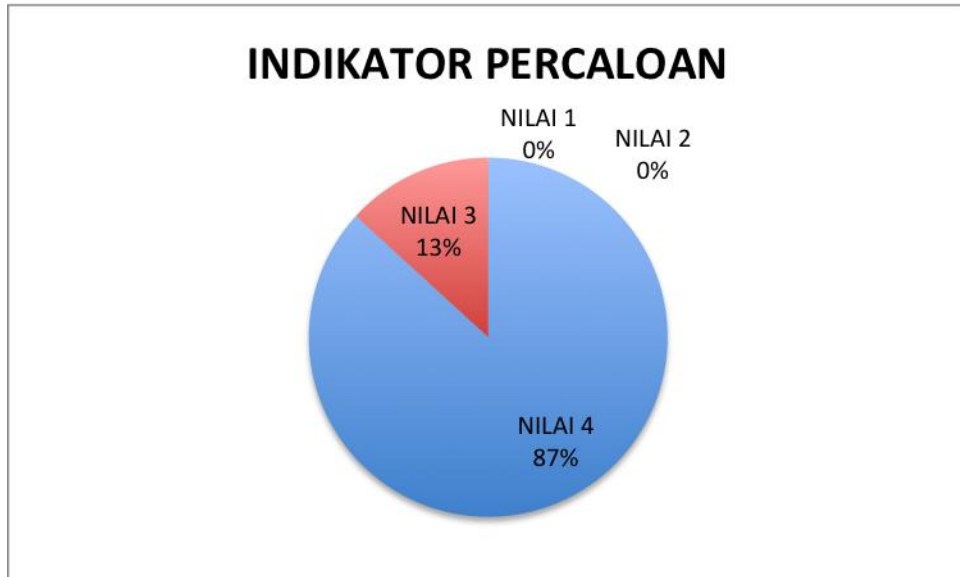
3.2.9. IndikatorPercaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3.87 (tiga koma delapan puluh tujuh).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

NO	NILAI	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1	NILAI 4	46	87%
2	NILAI 3	7	13%
3	NILAI 2	0	0,00%
4	NILAI 1	0	0,00%

Tabel 17.
Indeks pada indikator percaloan



3.2.10. Indikator Perbuatan Curang

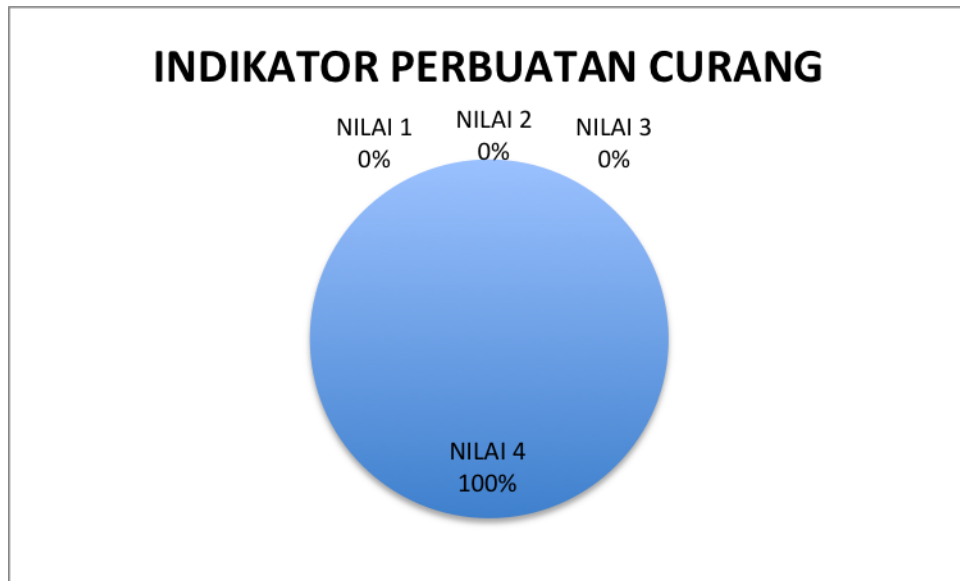
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4 (empat).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Korupsi.

NO	NILAI	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
1	NILAI 4	53	100%
2	NILAI 3	0	0,00%
3	NILAI 2	0	0,00%
4	NILAI 1	0	0,00%

Tabel 18.

Indeks pada indikator perbuatan curang



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan sebesar 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh).

NO	INDIKATOR	NILAI RATA-RATA
1	MANIPULASI PERATURAN	3,85
2	PENYALAHGUNAAN JABATAN	4
3	MENJUAL PENGARUH	3,81
4	TRANSPARANSI BIAYA	3,83
5	TRANSAKSI RAHASIA	3,83
6	BIAYA TAMBAHAN	3,73
7	HADIAH	3,81
8	TRANPARANSI PEMBAYARAN	3,94
9	PERCALOAN	3,87
10	PERBUATAN CURANG	4
NILAI INDEKS PRESEPSI KORUPSI		3,87

Tabel 19.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan

Kerja pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA



Indeks 3.87 (tiga koma delapan puluh tujuh) tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 96.75 (Sembilan puluh enam koma tujuh puluh lima).

Tabel 20.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Negeri Pekanbaru Kelas IA

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang

				bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	Peningkatan Pelayanan Informasi Jadwal Sidang

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,87 (tiga koma delapan tujuh) atau** masuk pada kategori **bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **bersih dari korupsi;**
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **bersih dari korupsi;**
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **bersih dari korupsi;**
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **bersih dari korupsi;**
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **bersih dari korupsi;**
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **bersih dari korupsi;**
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks **bersih dari korupsi;**
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat **bersih dari korupsi;**
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks **bersih dari korupsi;**
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **bersih dari korupsi;**

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan negeri. Tahun

2020 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas **3.26 (tiga koma dua puluh enam)** atau masuk pada persepsi **bersih dari korupsi** Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Biaya Tambahan** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.